

MERANCANG MANAJEMEN AGRIBISNIS SYARIAH DI DESA CINANGNENG, KECAMATAN TENJOLAYA, KABUPATEN BOGOR

Rully Trihantana¹, Ermi Suryani², Muhammad Alvin Ridallah³

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor

¹rully.trihantana@febi-inais.ac.id, ²ermisuryani@febi-inais.ac.id,

³muhammadalvin43257@gmail.com

ABSTRACT

This community service aims to design a sharia agribusiness management in Cingneng Village, Tenjolaya District, Bogor Regency, West Java Province. In this community service activity, activities are carried out based on participatory methods which involve the community with various suggestions and opinions as well as aspects of life that surround the people in the village. Counseling and consolidation activities were also carried out so that agriculture in the village developed. With this community service, it can be concluded that the development of agribusiness, especially in the development of agro-industry, can be directed not only to increase the achievement of economic efficiency, but also to increase equity and justice.

Key Words: Sharia Agribusiness Management, Cinangneng Village, Tenjolaya District, Bogor Regency.

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk merancang manajemen agribisnis syariah di Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kegiatan berdasarkan metode partisipatif yang melibatkan masyarakat dengan berbagai saran dan pendapat serta aspek kehidupan yang melingkupi masyarakat di desa tersebut. Dilakukan juga kegiatan penyuluhan dan konsolidasi agar pertanian yang ada di desa tersebut berkembang. Dengan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan agribisnis khususnya pada pengembangan agroindustri selain dapat diarahkan untuk meningkatkan pencapaian efisiensi ekonomi, juga untuk tujuan peningkatan pemerataan dan keadilan.

Kata-kata Kunci: Manajemen Agribisnis Syariah, Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor.

I. PENDAHULUAN.

Sektor pertanian memiliki peranan sangat penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Terutama di pedesaan sektor pertanian mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian penduduk desa serta mampu menyediakan bahan pangan bagi penduduk. Besarnya penduduk yang terlibat dalam sektor pertanian serta kemampuannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi seperti sekarang ini menjadikan alasan bahwa sektor pertanian sangat penting untuk dipertahankan dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia.

Perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun tumbuh semakin positif namun jumlah kemiskinan di Indonesia relative tinggi khususnya kabupaten atau kota Bogor. Data Badan statistik pada bulan februari 2022 tercatat jumlah angkatan kerja di kabupaten atau kota Bogor sebanyak 24, 82 juta dengan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 8,35% dan jumlah penduduk miskin 4 juta orang. Dengan demikian masih banyaknya angka pengangguran yang masih besar sehingga kemiskinan tidak dapat tertolong.

Pembangunan ekonomi tidak lagi bertumpu pada sektor pertanian konvensional semata melainkan pada sistem agribisnis. Sistem agribisnis akan melibatkan pertanian itu sendiri, agroindustri, pemasaran, dan jasa – jasa penunjang yang terkait atau dengan kata lain sistem agribisnis ini berubah menjadi manajemen agribisnis dengan penerapan fungsi – fungsi atau kegiatan manajemen (*planning, organizing, directing, controlling, dan evaluation*) pada setiap subsistem agribisnis mulai hulu sampai hilir serta sektor penunjangnya.

Desa Cinangneng merupakan desa yang produktif dalam hal pengelolaan lahan. Desa ini mengelola lahan dengan pertanian seperti bercocok tanam dengan saturan sawi dan katuk. Kedua sayuran ini merupakan produk unggulan karena

pasaran yang murah sehingga pasaran tidak begitu antusias. Terkadang ada saja tengkulak yang memainkan harga sayuran tersebut.

Keberadaan inovasi desa yang ada di Desa Cinangneng kurang begitu berkembang. Terobosan apapun sudah dilakukan. Dengan melihat keadaan topografi yang masih hijau lebih baik pengembangan dalam hal pertanian. Adapun kelompok tani atau gapoktan yang kurang berkembang membuat pemdes Cinangneng memutar otak apa dan bagaimana kedepannya. Usaha apa yang harus digalakan untuk masyarakat. Pada permasalahan ini dilakukan penyuluhan hingga konsolidasi agar pertanian yang berada pada desa tersebut perekonomiannya semakin meningkat serta mampu bekerjasama dengan pengusaha agroindustri baik pengusaha lokal/ domestik hingga pengusaha luar negeri.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Manajemen Syariah.

Manajemen secara etimologis, berasal dari bahasa latin *manus* yang berarti “tangan”, dalam bahasa prancis *management* yang berarti “seni melaksanakan dan mengatur”, sedangkan dalam bahasa inggris berasal dari kata *to manage* yang berarti “mengatur”. Pengaturan yang dilakukan melalui proses aktivitas dan diatur berdasarkan urutan dan fungsinya dinamakan manajemen.

Manajemen memiliki pengertian yang beragam, yaitu:

1. Seni Memimpin
2. Proses Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan
3. Bekerja melalui orang lain.

Jadi manajemen adalah segala sesuatu yang direncanakan dan ditentukan oleh seseorang, sedangkan pelaksanaan dari rencana dan ketentuan tersebut adalah

orang lain. Selain itu, manajemen adalah pengelolaan usaha, kepengurusan, ketata laksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang diinginkan. (Darmawan, 2013: 399).

Dalam perspektif syariah, manajemen adalah suatu kebutuhan yang tak terelakkan dalam memudahkan implementasi Islam pada kehidupan pada kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, manajemen sering dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan. (Amin, 2010).

Manajemen dalam islam sebagai “*getting god will done by the people*” atau melaksanakan keridhaan Allah SWT melalui orang. Menurut Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin dan Faisal Ananda Arfa, manajemen dalam islam ada dua pengertian, yaitu sebagai ilmu, dan sebagai aktivitas. Sebagai ilmu, manajemen dipandang sebagai salah satu ilmu umum yang tidak berkaitan dengan nilai, peradaban sehingga hukum mempelajarinya adalah *fardu kifayah*. Sedangkan sebagai aktivitas ia terikat pada nilai dan aturan atau *hadlarah* islam. (Maleha, 2016: 44 - 45).

II.2. Agribisnis.

Agribisnis (*agribusiness*) sendiri berasal dari kata agri (*agriculture*) dan bisnis (usaha komersial). Kata – pertanian (*agriculture*) diartikan sebagai pertanian dalam arti luas yang berkaitan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Agribisnis pada dasarnya adalah suatu perkembangan dari pertanian tradisional, dimana pada pertanian tradisional petani sudah mengerjakan kegiatan-kegiatan yang sudah termasuk agribisnis tetapi belum dilakukan secara komersial. (Rahim, 2005: 8).

II.2.1. Agribisnis sebagai Suatu Sistem.

Agribisnis sebagai suatu sistem adalah agribisnis yang merupakan seperangkat unsur yang secara teratur saing berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Agribisnis terdiri dari berbagai sub sistem yang tergabung dalam rangkaian interaksi dan interpedensi secara reguler serta terorganisir sebagai suatu totalitas. Adapun subsistem tersebut yaitu :

1. Subsistem Penyediaan Sarana Produksi.

Subsistem penyediaan sarana produksi menyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengelolaan dari sarana produksi, teknologi dan sumberdaya agar penyediaan sarana produksi atau input usaha tani memenuhi kriteria tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan produk.

2. Subsistem Usaha Tania atau Proses Produksi.

Subsistem ini mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian. Termasuk kedalam kegiatan ini adalah perencanaan pemilihan lokasi, komoditas, teknologi, dan pola usaha tani dalam meningkatkan produksi primer.

3. Subsistem Agroindustri/ Pengolahan Hasil.

Lingkup kegiatan ini tidak hanya aktivitas pengolahan sederhana ditingkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen produk pertanian sampai pada tingkat pengolahan lanjutandengan maksud untuk menambah *value added* (nilai tambah) dan produksi primer tersebut. Dengan demikian, proses pengupasan, pembersihan, pengekstraksian, penggilingan,

- pembekuan, pengeringan, dan peningkatan mutu.
4. Subsistem Pemasaran.
Subsistem pemasaran mencakup pemasaran hasil – hasil usahatani dan agro industri baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Kegiatan utama subsistem ini adalah pemantauan dan pengembangan informasi pasar dan market *intelligence* pada pasar domestik dan luar negeri.
 5. Subsistem Penunjang.
Subsistem ini merupakan penunjang kegiatan pra panen dan pasca panen yaitu:
 - a. Sarana Tataniaga
 - b. Perbankan/ pengkreditan
 - c. Penyuluhan Agribisnis
 - d. Kelompok Tani
 - e. Infrastruktur Agribisnis
 - f. Koperasi Agribisnis
 - g. BUMN
 - h. Swasta
 - i. Penelitian dan Pengembangan
 - j. Pendidikan dan Pelatihan
 - k. Transportasi
 - l. Kebijakan Pemerintah.

II.2.2. Strategi Pembangunan Sistem Agribisnis.

Dalam agribisnis tentu ada strategi dalam pembangunannya antara lain:

1. Pembangunan agribisnis merupakan pembangunan industri dan pertanian serta jasa yang dilakukan sekaligus, dilakukan secara simultan dan harmonis. Hal ini dapat diartikan bahwa perkembangan pertanian, industri dan jasa harus saling berkesinambungan dan tidak berjalan sendiri – sendiri. Yang sering didapatkan selama ini adalah industri pengolahan (agroindustri) berkembang di Indonesia tapi bahan bakunya dari impor dan tidak kurang menggunakan

- bahanbaku yang dihasilkan pertanian dalam negeri. Dipihak lain, peningkatan produksi pertanian tidak diikuti oleh perkembangan industri pengolahan (membangun industri berbasis sumber daya domestik / lokal) sehingga perlu pengembangan bisnis vertikal.
2. Menggerakkan ke-5 subsistem agribisnis secara simultan, serentak dan harmonis. Untuk menggerakkan sistem agribisnis perlu dukungan semua pihak yang berkaitan dengan agribisnis / pelaku – pelaku agribisnis mulai dari petani, koperasi, BUMN, dan swasta serta perlu seorang dirigen yang mengkoordinasi keharmonisan sistem agribisnis.
 3. Perkembangan sistem agribisnis melalui reposisi koperasi agribisnis. Perlu adanya perubahan fungsi/ paradigma koperasi yaitu untuk:
 - a. Meningkatkan daya saing harga melalui pencapaian skala usaha yang lebih optimal.
 - b. Meningkatkan peluang pasar.
 - c. Memperbaiki mutu produk dan jasa.
 - d. Meningkatkan pendapatan.
 - e. Menjadi wahana pengembangan ekonomi rakyat.
 4. Pengembangan sistem agribisnis melalui pengembangan sistem informasi agribisnis. Dalam membangun sistem informasi agribisnis ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah informasi produksi, informasi proses, informasi distribusi dan informasi pengolahan dan pasar.

II.2.3. Tahapan Pembangunan Cluster Industri Agribisnis.

Tahapan pembangunan sistem pembangunan agribisnis di Indonesia yakni:

1. Tahapan kelimpahan faktor produksi yaitu sumberdaya alam dan tenaga kerja tidak terdidik serta dari sisi produk akhir sebagian besar masih menghasilkan produk primer, perekonomian berbasis pada pertanian
2. Akan digerakkan oleh kekuatan investasi melalui percepatan pembangunan dan pendalaman industri pengolahan serta industri hulu pada setiap kelompok agribisnis
3. Tahap pembangunan sistem agribisnis yang didorong inovasi melalui kemajuan teknologi serta peningkatan sumberdaya manusia

II.2.4. Membumikan Pembangunan Sistem Agribisnis dalam Otonomi Daerah.

Membangun ekonomi *Desentralistis – Bottom – Up* yang mengandalkan industri berbasis sumberdaya lokal. Pembangunan ekonomi nasional akan terjadi di setiap daerah.

1. Pengembangan strategi pemasaran.
Pengembangan strategi pemasaran menjadi sangat penting peranannya terutama menghadapi masa depan dimana preferensi konsumen terus mengalami perubahan. Dalam hal tersebut, sekarang sudah mulai mengubah paradigma pemasaran menjadi menjual apa yang diinginkan oleh pasar (konsumen). Sehingga dengan berubahnya paradigma tersebut, maka pengetahuan yang lengkap dan rinci tentang preferensi konsumen pada setiap wilayah, negara, bahkan etnis dalam suatu negara menjadi sangat penting dalam segmentasi pasar dalam

upaya memperluas pasar produk – produk agribisnis yang dihasilkan.

2. Pengembangan sumberdaya agribisnis.

Dalam pengembangan sektor agribisnis agar dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar, perlunya pengembangan sumberdaya agribisnis khususnya pemanfaatan dan pengembangan teknologi serta pembangunan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Agribisnis sebagai sektor pengembangan agribisnis. Dalam pengembangan teknologi yang perlu dikembangkan adalah pengembangan teknologi aspek : bioteknologi, teknologi ekofarming, teknologi proses, teknologi produk dan teknologi informasi.

3. Penataan dan pengembangan struktur agribisnis.

Struktur agribisnis yang tersekat – sekat telah menciptakan masalah transisi dan margin ganda. Oleh karena itu, penataan dan pengembangan struktur agribisnis nasional diarahkan pada dua sasaran yaitu:

- a. Mengembangkan struktur agribisnis yang terintegrasi secara vertikal mengikuti suatu aliran produk sehingga subsektor agribisnis hulu, subsektor agribisnis pertanian primer dan subsektor agribisnis hilir berada dalam suatu keputusan manajemen
- b. Mengembangkan organisasi bisnis (ekonomi) petani / koperasi agribisnis yang menangani seluruh kegiatan mulai dari subsistem agribisnis hulu sampai dengan subsistem agribisnis

hilir, agar dapat merebut nilai tambah yang ada pada subsistem agribisnis hulu dan subsistem agribisnis hilir.

Dalam penataannya ada 3 bentuk diantaranya:

- a. Pengembangan koperasi agribisnis dimana petani tetap pada subsektor agribisnis usahatani, sementara kegiatan subsektor agribisnis dan hilir ditangani koperasi agribisnis milik petani.
 - b. Pengembangan agribisnis Integrasi Vertikal dengan pola usaha patungan (*joint venture*). Pada bentuk ini pelaku ekonomi pada subsektor hulu, primer dan hilir yang selama ini dikerjakan sendiri – sendiri harus dikembangkan dalam perusahaan agribisnis bersama yang dikelola oleh orang – orang profesional.
 - c. Pengembangan agribisnis Integratif Vertikal dengan pola kepemilikan tunggal/ grup/ publik yang pembagian keuntungannya didasarkan pada kepemilikan saham.
4. Pengembangan pusat pertumbuhan sektor agribisnis.

Perlu perubahan orientasi lokasi agroindustri dari orientasi pusat – pusat konsumen ke orientasi sentra produksi bahan baku, dalam hal ini untuk mengurangi biaya transportasi dan resiko kerusakan selama pengangkutan. Oleh karena itu, perlu pengembangan pusat – pusat pertumbuhan sektor agribisnis komoditas unggulan yang didasarkan pada peta perkembangan komoditas

agribisnis, potensi perkembangan dan kawasan kerjasama ekonomi. Serta berdasar pada komparatif wilayah. Perencanaan dan penataan perlu dilakukan secara nasional sehingga akan terlihat dan terpantau keunggulan setiap propinsi dalam menerapkan komoditas agribisnis unggulan yang dilihat secara nasional/ kantong – kantong komoditas agribisnis unggulan, yang titik akhirnya terbentuk suatu pengembangan kawasan agribisnis komoditas tertentu.

5. Pengembangan infrastruktur agribisnis.

Dalam pengembangan pusat pertumbuhan agribisnis, perlu dukungan pengembangan infrastruktur seperti jaringan jalan dan transportasi (laut, darat, sungai, dan udara), jaringan listrik, air, pelabuhan domestik dan pelabuhan ekspor dan lain – lain.

II.2.5. Kebijakan Terpadu Pengembangan Agribisnis.

Ada beberapa bentuk kebijaksanaan terpadu dalam pengembangan agribisnis antara lain:

1. Kebijaksanaan pengembangan produksi dan produktivitas ditingkat perusahaan.
2. Kebijaksanaan tingkat sektoral untuk mengembangkan seluruh kegiatan usaha sejenis.
3. Kebijaksanaan pada tingkat sistem agribisnisnya yang mengatur keterkaitan antara beberapa sektor.
4. Kebijaksanaan ekonomi makro yang mengatur seluruh kegiatan perekonomian yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap agribisnis.

Beberapa kebijaksanaan operasional untuk mengatasi masalah dan mengemban potensi, antara lain:

1. Mengembangkan forum komunikasi dapat mengkoordinasikan pelaku – pelaku kegiatan agribisnis dengan penentu – penentu kegiatan agribisnis dengan kebijaksanaan yang dapat mempengaruhi sistem agribisnis keseluruhan, atau subsistem dalam agribisnis.
2. Forum tersebut terdiri dari perwakilan departemen terkait.
3. Mengembangkan dan menguatkan asosiasi pengusaha agribisnis.
4. Mengembangkan kegiatan masing – masing subsistem agribisnis untuk meningkatkan produktivitas melalui litbang teknologi untuk mendorong pasar domestik dan internasional.

II.2.6. Pengembangan Agribisnis Berskala Kecil.

Ada 3 kebijaksanaan yang harus dilakukan, yaitu:

1. *Farming Reorganization.*
Reorganisasi jenis kegiatan usaha yang produktif dan diversifikasi usaha yang menyertakan komoditas yang bernilai serta reorganisasi manajemen usahatani. Dalam hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan yang rata – rata kepemilikan hanya 0,1 Ha.
2. *Small – Scale Industrial Modernization.*
Modernisasi teknologi, modernisasi sistem, organisasi dan manajemen, serta modernisasi dalam pola hubungan dan orientasi pasar.
3. *Services Rationalization.*
Pengembangan layanan agribisnis dengan rasionalisasi lembaga penunjang kegiatan agribisnis untuk menuju efisiensi dan daya saing lembaga tersebut. Terutama adalah lembaga

keuangan pedesaan, lembaga litbang khususnya penyuluhan.

II.2.6.1. Pembinaan Sumberdaya Manusia untuk Mendukung Pengembangan Agribisnis dan Ekonomi Pedesaan.

Dalam era agribisnis, aktor utama pembangunan agribisnis dan aktor pendukung pembangunan agribisnis perlu ada pembinaan kemampuan aspek bisnis, manajerial dan berorganisasi bisnis petani serta peningkatan wawasan agribisnis. Dalam hal ini perlu orientasi peran penyuluhan pertanian yang merupakan lembaga pembinaan SDM petani. Oleh karena itu, perlu peningkatan pendidikan penyuluh baik melalui pendidikan formal, kursus singkat, studi banding.

II.2.6.2. Pemberdayaan Sektor Agribisnis sebagai Upaya Penanggulangan Krisis Pangan dan Devisa.

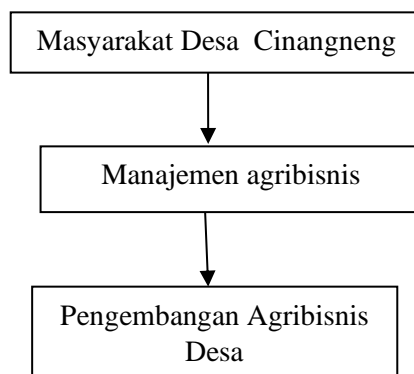
Perlunya langkah – langkah reformasi dalam memberdayakan sektor agribisnis nasional, antara lain:

1. Reformasi strategi dan kebijakan industrialisasi dan industri canggih kepada industri agribisnis domestik.
2. Kebijakan penganeekaragaman pola konsumsi berdasarkan nilai – nilai kelangkaan bahan pangan.
3. Reformasi pengelolaan agribisnis yang integratif melalui satu departemen yaitu Departemen Agribisnis.
4. Pengembangan agribisnis yang integrasi vertikal dari hulu sampai hilir melalui koperasi agribisnis.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode partisipatif, dan dilaksanakan selama bulan Agustus sampai dengan September 2021.

Dengan metode pengabdian kepada masyarakat ini mampu memberikan solusi tepat untuk pengelolaan gapoktan yang lebih terarah dan lebih berkembang. Dengan begitu, bekerjasama dengan aparat desa yang mengurus pertanian untuk mengembangkan usaha tani yang ada di desa tersebut agar lebih meningkatkan produksi pertaniannya dalam berinovasi. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini maka kerangka pemikiran yang ada dalam kegiatan ini sebagai berikut:



Dari kerangka berpikir di atas Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor memerlukan manajemen agribisnis dalam pengembangan agribisnis desa tersebut.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.

IV.1. Sejarah Singkat Desa Cinangneng.

Desa Cinangneng adalah salah satu desa di Kecamatan Tenjolaya yang mempunyai luas wilayah 257.295 Ha. Jumlah penduduk Desa Cinangneng sebanyak 9.492 jiwa, yang terdiri dari 4.522 laki – laki dan 4.970 perempuan. Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 3.460 KK. Sedangkan jumlah keluarga miskin 726 KK dengan presentase 21% dari jumlah keluarga yang ada di Desa Cinangneng.

Dilihat dari topografi dan kontur tanah Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya secara umum berupa dataran tinggi yang berada pada ketinggian antara 450 m s/d 460 m. di atas permukaan laut di atas rata – rata berkisar antara 27 s/d 27,5 celcius. Desa Cinangneng terdiri dari 6 RW dan 23 RT.

Pada umumnya lahan yang terdapat di Desa Cinangneng digunakan secara produktif, dan hanya sedikit yang tidak digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Cinangneng memiliki sumber daya alam yang memadai dan siap untuk dikelola. Luas lahan berupa sawah teknis seluas 28 Ha. Perikanan seluas 2 Ha. Dan lahan lainnya berupa pekarangan dan pemukiman seluas 27 Ha.

Selain pertanian padi, masyarakat Cinangneng juga bercocok tanam sayuran sawi dan katuk. Kedua sayuran ini merupakan produk unggulan karena pasarnya yang murah sehingga pasarnya tidak begitu antusias. Terkadang ada saja tengkulak yang memainkan harga sayuran tersebut.

Keberadaan inovasi desa yang ada di Desa Cinangneng kurang begitu berkembang. Terobosan apapun sudah dilakukan. Dengan melihat keadaan topografi yang masih hijau dan air yang cukup deras lebih baik pengembangan dalam hal pertanian. Adapun kelompok tani atau gapoktan yang kurang berkembang membuat pemdes Cinangneng memutar otak apa dan bagaimana kedepannya. Usaha apa yang harus dilakukan untuk masyarakat.

IV.2 Pengembangan Agribisnis di Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya.

Sejalan dengan semakin derasnya arus globalisasi yang menyebabkan pasar internasional bagi produk – produk pertanian semakin terbuka dan tingkat persaingannya pun semakin ketat. Tuntutan terhadap kualitas dan kuantitas produk – produk pertanian di Indonesia dirasakan semakin mendesak. Bahkan di

Desa Cinangneng sudah sangat tertinggal dalam segala persaingan yang ada. Untuk itu perlu adanya efisiensi dan inovasi yang tinggi dalam mengusahakan komoditi yang bersangkutan, dengan kualitas hasil yang sesuai dengan tuntutan pasar. Untuk itu diperlukan strategi – strategi dasar yang dapat mendorong gapoktan dalam pengembangan agribisnis ini.

Bekerjasama dengan aparat desa dan gapoktan Desa Cinangneng dalam pengembangan agribisnis agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dalam hal ini terutama pada sayuran sawi dan katuk yang dijual murah kepada tengkulak kini harus dikembangkan agar menjadikan suatu usaha yang dapat dijadikan sumber penghasilan yang lebih baik sehingga petani sayuran tersebut harus melakukan sebuah inovasi dalam pengembangannya.

Di Desa Cinangneng bersama gapoktan mengadakan penyuluhan kepada petani – petani tentang strategi dalam pengembangan manajemen agribisnis yang syariah. Strategi dasar yang dilakukan pertama kali pada pengembangan unit agroindustri. Pengembangan agroindustri merupakan strategi operasional yang tepat sebagai implementasi dari konsep pengembangan wilayah Desa Cinangneng agar tertata rapih. Mengingat pasar yang tidak selamanya sempurna dan adanya senjang informasi, maka gapoktan membentuk agroindustri yang harus berpacu melalui peran aktif pemerintah yang bertindak sebagai inisiator gagasan, mediator, fasilitator, pelindung dan regulator yang jujur, adil dan bijaksana. Dalam meningkatkan pengembangan agrobisnis gapoktan melakukan kegiatan untuk para petani yaitu konsolidasi segmen – segmen kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian ini selain bisa diarahkan untuk meningkatkan pencapaian efisiensi ekonomi, juga bisa untuk tujuan peningkatan pemerataan dan keadilan. Dengan kegiatan ini, dapat menjadikan satu kesatuan dengan industri “pengolahan

hasil”. Gejala umum yang tidak sehat seperti harga bahan baku (hasil usaha tani petani) yang ditekan oleh pengusaha pengolah hasil pertanian tidak lagi dijumpai. Peningkatan efisiensi dapat dimulai dari konsolidasi lahan usaha tani, untuk dikelola secara bersama. Beberapa manfaat adanya kegiatan pertanian ini yaitu:

1. Seluruh rangkaian kegiatan fisik dapat diselenggarakan di Desa sehingga pengembangan pertanian berimpit dengan pengembangan ekonomi desa setempat.
2. Sumberdaya pertanian di desa ini bisa dikelola secara efisien
3. Mendorong perekonomian desa berkembang lebih pesat, sehingga dapat membendung mengalirnya tenaga – tenaga kerja muda yang potensial dari desa ke kota.

Organisasi petani atau poktan di Desa Cinangneng harus adanya pembenahan didalamnya serta perlu adanya pengembangan, yaitu :

1. Organisasi untuk mengatur sumberdaya milik bersama seperti organisasi petani pengguna air, pemanfaatan hutan atau lahan adat dan sebagainya.
2. Organisasi bisnis koperatif yang dapat berupa kolektif (pembelian sarana produksi, kolektif, pengadaan moda kolektif, dan pemasaran hasil kolektif), usaha bersama (kongsi) dan koperasi.
3. Organisasi lobi politik – ekonomi dengan membentuk paguyuban petani.

IV.3 Pengembangan Infrastruktur Desa

Adanya infrastruktur ekonomi yang memadai merupakan prakondisi bagi tumbuh kembangnya kegiatan agribisnis dan perekonomian secara umum di pedesaan. Infrastruktur yang sesuai bagi agribisnis perekonomian desa yaitu:

1. Sistem Pengairan.
2. Pasar Komoditas Pertanian.

3. Jalan Raya.
4. Kelistrikan.
5. Jaringan Telekomunikasi.

Infrastruktur tersebut merupakan barang publik atau semi publik sehingga pembangunannya harus diseenggarakan oleh pemerintah bersama – sama dengan masyarakat (swasta). Pembangunan infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah yang paling strategis dalam operasionalisasi paradigma PAPEBA. Walaupun dalam volume, kualitas dan waktu yang berbeda, setiap tanaman membutuhkan air. Agroindustri juga membutuhkan air yang cukup. Bagi usaha pertanian, sistem irigasi berguna untuk :

1. Meningkatkan produktivitas lahan
2. Meningkatkan intensitas tanaman
3. Meningkatkan potensi diversifikasi penggunaan lahan.

Pengusaha agribisnis dan pedesaan secara umum memiliki kekuatan politik yang relatif rendah dibandingkan dengan pengusaha non – agribisnis dan penduduk perkotaan. Kebijakan harga, perdagangan, fiskal dan moneter seringkali merugikan dan menghambat pertumbuhan agribisnis, lebih – lebih yang berlokasi di pedesaan. Produk – produk agribisnis pada umumnya tidak elastis sehingga harganya cenderung menurun secara sekuler. Produk agribisnis menyebabkan nilai tukar (*terms of trade*) sehingga menghambat pertumbuhan agribisnis di pedesaan.

V. SIMPULAN.

Desa Cinangneng merupakan desa dengan lahan yang produktif. Masyarakat Desa Cinangneng bercocok tanam dengan sayuran sawi dan katuk. Dalam pengembangan manajemen agribisnis bekerjasama dengan gapoktan serta aparat pemerintah melakukan penyuluhan serta konsolidasi agar masyarakat desa tersebut untuk peningkatan perekonomiannya. pengembangan agribisnis khususnya pada pengembangan agroindustri selain bisa diarahkan untuk meningkatkan pencapaian

efisiensi ekonomi, juga bisa untuk tujuan peningkatan pemerataan dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Amin, A. R. (2010). Menggagas Manajemen Syariah. *Teori dan praktik the ceestia management* .
- Darmawan, H. (2013). *Kamus Ilmiah Populer lengkap* . (Yogyakarta: Bintang Cemerlang).
- Maleha, N. Y. (2016). Manajemen Bisnis Dalam Islam. *Economica Sharia Voume 1 Nomor 2 Edisi Februari* , 44-45.
- R, H. (n.d.). Membangun Sistem Agribisnis. 1 -2.
- Rahim, a. D. (2005). *Sistem Manajemen Agribisnis*. (Makassar: Badan Universitas Negeri Makassar).